**DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP**

Astri Furqani

Rusnani

Norsain

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wiraraja

Email : [imamdarul@wiraraja.ac.id](mailto:imamdarul@wiraraja.ac.id)

**Abstrrak**

Corona virus disease 2019 (covid 19) berdampak berbagai sektor, sehingga pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait penanganan Covid 19. Sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam menangani Covid-19 adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 2020 dengan Nomor 4, tentang refocussing kegiatan, realokasi pada anggaran, serta percepatan proses pengadaan barang dan jasa untuk penanganan virus ini. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dampak pandemi covid 19 terhadap penyerapan APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2020. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif . Data yang akandiolah merupakan data pada periode anggaran daerah tahun 2019 dan tahun 2020 sehingga peneliti dapat mengetahui dampak positif dan dampak negatif pandemi covid-19 terhadap penyerapan anggaran daerah kabupaten Sumenep. Tehnik analisis data yang digunakan berupa rasio keuangan yaitu rasio efektivitas, efisiensi dan nilai kinerja penyerapan anggaran. Hasil Penelitian Realisasi anggaran ditahun 2020 hanya terserap sebesar 80,77% yang berarti “kurang efektif”, sedangkan di tahun 2019 tingkat efektifitas 69,78% berada dikategori cukup efektif. Analisis efisiensi di tahun 2019 perbandingan antara realisasi belanja langsung dengan jumlah belanja daerah sebesar 37,99% sedangkan ditahun 2020 sebesar 36,02% atau dengan kata lain untuk analisis efisiensi termasuk dalam kategori “sangat efisien. Dampak pandemi covid 19 menyebabkan serapan anggaran di tahun 2020 mengalami penurunan seperti belanja barang dan jasa yang hanya terserap sebesar 59,43% hal tersebut karena beberapa program kegiatan, perjalanan dinas di tahun 2020 tidak terlaksana dikarenakan adanya kebijakan aturan PPKM.

**Kata Kunci:** Anggaran, APBD, Covid-19

**Abstract**

*Corona virus disease 2019 (covid 19) has an impact on various sectors, so the government has issued several policies related to handling Covid 19. As a form of government support in handling Covid-19, there is Presidential Instruction of the Republic of Indonesia in 2020 Number 4, concerning refocusing activities, reallocation of the budget, and acceleration of the procurement process of goods and services to handle this virus. The purpose of this study is to determine the impact of the covid 19 pandemic on the absorption of the Sumenep Regency APBD for the 2020 Fiscal Year. This research is a descriptive quantitative study. The data to be processed is data from the 2019 and 2020 regional budget periods so that researchers can determine the positive and negative impacts of the covid-19 pandemic on the absorption of the Sumenep Regency regional budget. The data analysis technique used is a financial ratio, namely the ratio of effectiveness, efficiency and budget absorption performance value. Research Results The budget realization in 2020 was only absorbed by 80.77% which means "less effective", while in 2019 the effectiveness level of 69.78% was in the fairly effective category. Efficiency analysis in 2019, the comparison between the realization of direct spending and the amount of regional spending was 37.99% while in 2020 it was 36.02% or in other words for efficiency analysis it was included in the category of "very efficient. The impact of the Covid-19 pandemic caused budget absorption in 2020 to decrease, such as spending on goods and services which was only absorbed by 59.43%. This was because several activity programs and official travel in 2020 were not implemented due to the PPKM regulation policy.*

***Keywords:*** *Budget, APBD, Covid-19*

**Pendahuluan**

Di Indonesia, pandemi virus corona telah ditetapkan pemerintah sebagai bencana nasional tepatnya pada tanggal 14 Maret 2020 dan hal tersebut merupakan masa darurat bencana non alam. Corona virus disease 2019 atau biasa disingkat dengan istilah covid 19 berdampak pada semua sektor. Sehingga kurang lebih selama 1 tahun terhitung sejak Maret 2020 hingga di tahun 2021 pemerintah Indonesia telah menerapkan beberapa kebijakan terkait penanganan Covid 19.

Pada semester I-2020, pemerintah Indonesia menitik beratkan pada sektor kesehatan. Hal tersebut terdapat Keppres Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 dengan dibentuknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Berbagai kebijakan aturan lainnya seperti protokol/panduan kesehatan, kampanye cuci tangan-penggunaan masker-jaga jarak secara masif, menetapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di berbagai wilayah, larangan mudik lebaran, menyiapkan laboratorium untuk tes Covid-19, menjalankan tes Covid-19 di berbagai tempat, hingga penetapan tatanan normal baru. Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menghentikan laju kenaikan kasus pada semester II-2020 dengan memperluas cakupan strategi, yakni penanganan di bidang ekonomi, di bidang kesehatan, pemerintah terus mengampanyekan perilaku 3M (memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan dengan sabun), serta penetapan program vaksinasi nasional. Memasuki Agustus 2020 penerapan protokol kesehatan tidak hanya sebatas imbauan. Pemerintah meningkatkan disiplin dan menegakkan hukum protokol kesehatan melalui Inpres No. 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Pada triwulan akhir 2020, pemerintah fokus pada pengadaan vaksin Covid-19. Hal ini ditandai dengan terbitnya Perpres No. 99 tahun

2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Berbagai kementerian lain juga terlibat mendukung strategi penangangan Covid-19 di Indonesia sepanjang semester II 2020 seperti Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Surat Edaran Menpan RB No. 64 Tahun 2020 tentang Kegiatan Perjalanan Dinas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru. Surat Edaran yang ditujukan kepada ASN ini mengatur perjalanan dinas dengan memperhitungkan risiko penularan Covid-19. Langkah konkretnya adalah dengan menentukan kriteria perjalanan dinas ASN secara ketat. Selain itu, ASN yang melakukan perjalanan diimbau untuk mematuhi protokol kesehatan sebagaimana telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. (https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/kebijakan-pemerintah-menangani-covid-19- sepanjang-semester-ii-2020).

Selain kebijakan penerapan protocol kesehatan dengan 5 M, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan terkait penggunaan APBN dalam menangani dan mencegah penyebaran Covid-19 (Yunus & Rezki, 2020). Kebijakan tersebut dituangkan dalam instruksi presiden (Inspres) nomor 4 tahun 2020 tentang refocussing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan covid disease 2019 (covid-19).

Refocusing anggaran sesuai amanat Inpres Nomor 4/2020 diwajibkan kepada seluruh APBD provinsi maupun kabupaten/Kota. Melalui beberapa pemberitan, semua pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan refocusing anggaran pada APBD Tahun 2020 untuk menangani pandemic Covid 19. Refocusing anggaran juga dilakukan pada APBD Kabupaten Sumenep. Sesuai data awal dana refocusing pada APBD Kabupaten Sumenep sebesar Rp 90,8 miliar Anggaran tersebut dipangkas dari program dan kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD).

Refocusing anggaran akibat pandemi Covid 19 mempengaruhi penyerapan anggaran di kementrian/lembaga maupun di pemerintah daerah. Tidak terkecuali juga di kabupaten Sumenep. Dana hasil refocusing APBD Kabupaten Sumenep pada tahun 2020 untuk Covid-19 tidak dibelanjakan semua. Anggaran hasil refocusing yang sudah terealisasi sebesar Rp55,5 miliar, sedangkan Sisa anggarannya di akhir tahun 2020 senilai Rp35,3 miliar. (https://kabarmadura.id/sisa-anggaran-refocusing-di-sumenep-rp353-m/). Kepala Bidang Anggaran BPPKAD Kabupaten Sumenep Ferdiansyah mengatakan, sisa anggaran refocusing secara otomatis masuk di kas daerah yang direncanakan akan dialokasikan pada kebutuhan

Covid-19 di tahun 2021. Terbitnya Inpres Inpres Nomor 4/2020 dapat mempengaruhi keterserapan anggaran.

Pemerintah Pusat melalui kementrian Dalam Negeri telah mengeluarkan beberapa kebijakan agar realisasi penyerapan anggaran di tahun 2020 tinggi seperti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 903.05/5999/SJ tanggal 2 November 2020 perihal Pembentukan Tim Asistensi Percepatan Penyerapan APBD. Hal tersebut ditindaklanjuti di tingkat Pemerintah Kabupaten Sumenep dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 188/508/KEP/435.013/2020 tentang Tim Asistensi Percepatan Penyerapan APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2020.

Terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang dampak covid-19 di Indonesia antara lain, Terjadinya pandemi Covid-19 dan dampaknya terhadap perekonomian di NTB (Maryani et al., 2020), COVID-19 dan dampak yang dirasakan oleh pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah (Pakpahan, 2020) dan komitmen pelaksana pengawasan pada penerapan akuntabilitas penggunaan anggaran penanganan pencegahan terhadap penularan COVID-19 (Nurwahidah, 2020), serta dampak pandemic terhadap penyerapan anggaran Kantor dikementrian agama kabupaten Mojokerto (Andik suyitno, 2020) . Beberapa penelitian tersebut belum ada yang mengambil tema tentang dampak pandemic covid 19 terhadap penyerapan anggaran daerah, sehingga perbedaan penelitian ini dengan penelitian ini yaitu fokus yang diambil dalam penelitian ini tentang dampak pandemic covid 19 terhadap penyerapan APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2020.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dampak pandemi covid 19 terhadap penyerapan APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2020. Kontribusi penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan kajian bagi pemerintah daerah Kabupaten Sumenep dalam mencapai tujuannya melalui penyerapan anggaran secara maksimal. Target luaran yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu publikasi di jurnal nasional ber-ISSN.

**Kerangka Teori**

**Anggaran**

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan dapat mencapai tujuannya melalui penyerapan anggaran yang maksimal karena setiap daerah dapat memanfaatkan segala potensi sumber daya yang dimilikinya. Menurut Mardiasmo (2018) anggaran merupakan pernyataan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama satu periode waktu tertentu yang dunyatakan dalam ukuran finansial

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah yang menunjukkan ketaatan pada APBD dengan menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daeah dalam satu periode pelaporan (Sari DN, dkk, 2018).

**Belanja Daerah**

Definisi belanja daerah dalam PSAP No.2 Paragraf 7, mengatur bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Klasifikasi Belanja Daerah menurut ( PSAP No.2 Paragraf 36-40 dalam Erlina dkk., 2015) dikelompokkan menjadi :

a. Belanja operasi.

Belanja operasi adalah pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri dari : belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial

b. Belanja modal

Belanja modal (Afiah Nunuy, 2020) adalah jenis pengeluaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belaja modal terdiri dari belanja modal untuk perolehan tanah, dedung, dan bangunan, peralatan, serta asset tak berwujud

c. Belanja lain-lain atau belanja tak terduga

Belanja tak terdugaadalah pengeluaran anggran pemerintah daerah untuk keperluan darurat, termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Contohnya adalah penanggulanangan bencana alam, social dan lain sebagainya

d. Belanja Transfer

Belanja transfer adalah pengeluaran anggaran dari pemerntah daerah kepada pemerintah daeraha lainnya atau penegeluaran anggran dari pemerintah daeraha kepada pemerintah desa. Belanja transfer dibedakan menjadi 2 jenis yaitu belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.l.

**Efektivitas**

Efektivitas menurut Mardiasmo (2009) pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely).

**Efisiensi**

Mardiasmo (2009:132) efesiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efesien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (spending well).

**Nilai Kinerja Keuangan**

Dalam Andik Suyitno (2020) Nilai kinerja keuangan berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dengan Nomor S-837/MK.05/2019 berupa langkah strategis dalam pelaksanaan anggaran tahun 2020. Yang ditindaklanjuti oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan berupa peraturan yang membahas petunjukteknis dalam penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran belanja di Kementerian Negara / Lembaga karena hal tersebut menjadi pedoman untuk pelaksanaan anggaran di tahun 2020dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dihitung berdasarkan rasio antara prosentase penyerapan anggaran atas PAGU DIPA terhadap target penyerapan anggaran triwulanan

2. Target penyerapan anggaran KL ditetapkan secara proporsional untuk triwulanan I-II-III- IV sebesar 15%-40%-60%-90%

Terhadap Satker/Eselon I/KL dengan tingkat penyerapan realisasi di atas target penyerapan triwulanan maka nilaikinerja diberikan maksimal sebesar 100

**Metode Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif karena penelitian ini digunakan untuk mengetahui kejadian dengan sistem penggolahan data yang sudah ada berupa angka-angka dalam menggambarkan situasi dan kondisi instansi (Sugiyono, 2008).

Data yang akan diolah merupakan data pada periode anggaran daerah tahun 2019 dan tahun 2020 sehingga dapat menganalisis dampak pandemi covid-19 terhadap penyerapan anggaran daerah dengan membandingkan dan menganalisis dari sebelum terjadinya pandemi yaitu pada data tri wulan selama tahun 2019 dan data triwulan selama tahun 2020 setelah terjadi pandemi covid-19. Sehingga dapat mengetahui apa saja dampak positif dan dampak negativ dari terjadinya pandemi covid -19 terhadap penyerapan anggaran daerah dengan alat analisis yaitu rasio efektivitas, efisiensi, nilai kinerja penyerapan anggaran.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu interview (wawancara), observasi dan dokumentasi. Wawancara (interview) dan dokumentasi. Wawancara dilakukan baik secara terstruktur maupun wawancara tidak terstruktur terkait dampak pandemi covid-19 terhadap penggunaan anggaran. Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah maupun fokus penelitian yang sudah ditetapkan, antara lain data APBD tahun 2019 dan 2020, Laporan Keuangan Daerah, dan Laporan Kinerja sebagai tambahan data penelitian.

Untuk dapat menganalisis dampak pandemic covid 19 terhadap penyerapan anggaran daerah menurut Andik Suyitno (2020) dapat dilakukan dengan mengukur rasio efisiensi dan nilai kinerja penyerapan anggaran.Namun penelitian ini tidak hanya terbatas pada rasio efisiensi dan nilai kinerja penerapan anggran saja namun menambahkan rasio efektivitas, selain dengan cakupan bjek yang lebih besar bukan hanya 1 instansi saja.

**Hasil dan Pembahasan**

**Efektivitas Anggaran Belanja**

Untuk menganalisis efektivitas pengelolaan Anggaran Belanja dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja yang diperoleh dari Laporan Reliasasi Anggaran (LRA) selama tahun 2019 dan tahun 2020 berikut ini:

**Tabel 1.** Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2019 (dalam rupiah)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BELANJA DAERAH** | **ANGGARAN** | **REALISASI** | **%** | **SISA ANGGARAN** |
| **BELANJA TIDAK LANGSUNG** | **1.605.115.023.429,00** | **1.440.668.877.831** | **89,75** | **164.446.145.598** |
| Belanja Pegawai | 985.611.041.458,00 | 837.267.130.805 | 84,95 | 148.343.910.653 |
| Belanja Hibah | 83.059.675.200,00 | 75.903.601.600 | 91,38 | 7.156.073.600 |
| Belanja Bantuan Sosial | 15.911.650.000,00 | 13.966.050.000 | 87,77 | 1.945.600.000 |
| Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa | 2.319.564.504,00 | 0 | 0,00 | 2.319.564.504 |
| Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa | 513.213.092.267,00 | 510.731.909.106 | 99,52 | 2.481.183.161 |
| Belanja Tidak Terduga | 5.000.000.000,00 | 2.800.186.320 | 56,00 | 2.199.813.680 |
| **BELANJA LANGSUNG** | **1.270.952.377.243,00** | **882.455.046.762** | **69,43** | **388.497.330.481** |
| Belanja Pegawai | 74.258.104.194,80 | 66.814.536.613 | 89,98 | 7.443.567.582 |
| Belanja Barang Dan Jasa | 569.604.049.685,65 | 448.360.778.594 | 78,71 |  |
| Belanja Modal | 627.090.223.362,54 | 367.279.731.555 | 58,57 | 259.810.491.807 |
| **Jumlah BELANJA DAERAH** | **2.876.067.400.672,00** | **2.323.123.924.593** | **80,77** | **552.943.476.079** |

**Tabel 2.** Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020 (dalam rupiah)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BELANJA DAERAH** | **ANGGARAN** | **REALISASI** | **%** | **SISA ANGGARAN** |
| **BELANJA TIDAK LANGSUNG** | **1.815.701.601.356,00** | **1.288.791.814.374,80** | **70,98** | **526.909.786.981,23** |
| Belanja Pegawai | 980.302.186.924,04 | 848.110.585.169,65 | 86,52 | 132.191.601.754,00 |
| Belanja Hibah | 198.902.508.300,00 | 192.726.124.300,00 | 96,89 | 6.176.384.000,00 |
| Belanja Bantuan Sosial |  | 14.285.050.000,00 |  |  |
| Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa | 2.319.564.504,00 | 2.004.732.906,71 | 86,43 | 314.831.597,29 |
| Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa | 511.910.093.420,00 | 169.777.088.380,00 | 33,17 | 342.133.005.040,00 |
| Belanja Tidak Terduga | 107.307.198.208,00 | 61.888.233.618,45 | 57,67 | 45.418.964.589,55 |
| **BELANJA LANGSUNG** | **1.071.393.220.034,90** | **725.828.271.999,50** | **67,75** | **345.564.948.035,43** |
| Belanja Pegawai | 29.489.953.239,78 | 11.783.821.500,00 | 39,96 | 17.706.131.739,78 |
| Belanja Barang Dan Jasa | 625.894.146.725,02 | 371.942.677.582,92 | 59,43 | 253.951.469.142,10 |
| Belanja Modal | 416.009.120.070,13 | 342.101.772.916,58 | 82,23 | 73.907.347.153,55 |
| Jumlah BELANJA DAERAH | 2.887.094.821.390,97 | 2.014.620.086.374,31 | 69,78 | 872.474.735.016,66 |

Dari table 1 diatas tampak terlihat bahwa perbandingan antara realiasasi anggaran belanja terhadap target belanja daerah ditahun ditahun 2019 sebesar 80,77% dan masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 552.943.476.079 dan dapat dikategorikan Cukup Efektif (80%-90%). Sedangkan dari table 4.2 pada tahun 2020 untuk rasio efektivitas sebesar 69,78%. Realisasi anggaran hanya terserap sebesar Rp. 2.014.620.086.374,31 dengan selisih sebesar Rp. 872.474.735.016,66 yang berarti “kurang efektif” karena berada diantara 60%-80%. Serapan anggaran di tahun 2020 memang mengalami penurunan seperti belanja barang dan jasa yang hanya terserap sebesar 59,43% hal tersebut karena beberapa program kegiatan, perjalanan dinas di tahun 2020 tidak terlaksana dikarenakan adanya kebijakan aturan PPKM terkait pandemic covid -19. Dan belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa juga hanya terserap sebesar 33,17% dari yang seharusnya target anggaran belanjanya sebesar Rp.511.910.093.420,00 namun hanya terserap Rp. 169.777.088.380 dengan selisih 342.133.055.040.

**Efisiensi Anggaran Belanja**

**Tabel 3.** Analisis Efesiensi Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2019 (dalam rupiah)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BELANJA DAERAH** | **REALISASI** | **% efisiensi** |
| **BELANJA LANGSUNG** | **882.455.046.762** | **= 882.455.046.762 2.323.123.924.593**  **= 37,99%** |
| Belanja Pegawai | 66.814.536.613 |
| Belanja Barang Dan Jasa | 448.360.778.594 |
| Belanja Modal | 367.279.731.555 |
| **Jumlah BELANJA DAERAH** | **2.323.123.924.593** |

**Tabel 4.** Analisis Efisiensi Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020 (dalam rupiah)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BELANJA DAERAH** | **REALISASI** | **% efisiensi** |
| **BELANJA LANGSUNG** | **725.828.271.999,50** | **= 725.828.271.999,50 2.014.620.086.374,31**  **= 36,03%** |
| Belanja Pegawai | 11.783.821.500,00 |
| Bela  nja Barang Dan Jasa | 371.942.677.582,92 |
| Belanja Modal | 342.101.772.916,58 |
| **Jumlah BELANJA DAERAH** | **2.014.620.086.374,31** |

Untuk analisis efisiensi di tahun 2019 perbandingan antara realisasi belanja langsung dengan jumlah belanja daerah sebesar 37,99% sedangkan di tahun 2020 sebesar 36,02% atau dengan katal ain untuk analisis efisiensi termasuk dalam kategori “sangat efisien” hal tersebut dikarenakan berada dikisaran 0 - 60%.

**Mengukur nilai kinerja peyerapan anggaran**

Nilai kinerja keuangan berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dengan Nomor S-837/MK.05/2019

**Tabel 5** Nilai Kinerja Penyerapan anggaran Triwulan 1 tahun 2019

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BELANJA DAERAH** | Penyerapan Anggaran  % | Target (%) | NKPAn | Kriteria |
| **BELANJA TIDAK LANGSUNG** | **8,66** | **15** | 57,73 | Tidak Baik |
| Belanja Pegawai | 13,87 | **15** | 92,47 | Baik |
| Belanja Hibah | 0 | **15** | 0,00 | Tidak Baik |
| Belanja Bantuan Sosial | 0 | **15** | 0,00 | Tidak Baik |
| Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa | 0 | **15** | 0,00 | Tidak Baik |
| Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa | 0,05 | **15** | 0,33 | Tidak Baik |
| Belanja Tidak Terduga | 39,6 | **15** | 264,00 | Sangat Baik |
| **BELANJA LANGSUNG** | **3,77** | **15** | 25,13 | Tidak Baik |
| Belanja Pegawai | 5,04 | **15** | 33,60 | Tidak Baik |
| Belanja Barang Dan Jasa | 7,36 | **15** | 49,07 | Tidak Baik |
| Belanja Modal | 0,36 | **15** | 2,40 | Tidak Baik |
| **Jumlah BELANJA DAERAH** | **6,5** | **15** | 43,33 | Tidak Baik |

**Tabel 6.** Nilai Kinerja Penyerapan anggaran Triwulan 2 tahun 2019

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BELANJA DAERAH** | Penyerapan Anggaran  % | Target (%) | NKPAn | Kriteria |
| **BELANJA TIDAK LANGSUNG** | 31,23 | 40 | 78,07 | Kurang Baik |
| Belanja Pegawai | 42,29 | 40 | 105,73 | Sangat Baik |
| Belanja Hibah | 2,22 | 40 | 5,54 | Tidak Baik |
| Belanja Bantuan Sosial | 1,89 | 40 | 4,71 | Tidak Baik |
| Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota  Dan Pemerintahan Desa | 0,00 | 40 | 0,00 | Tidak Baik |
| Belanja Bantuan Keuangan Kepada  Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa | 15,56 | 40 | 38,89 | Tidak Baik |
| Belanja Tidak Terduga | 48,91 | 40 | 122,28 | Sangat Baik |
| **BELANJA LANGSUNG** | 12,00 | 40 | 29,99 | Tidak Baik |
| Belanja Pegawai | 21,88 | 40 | 54,70 | Tidak Baik |
| Belanja Barang Dan Jasa | 20,65 | 40 | 51,63 | Tidak Baik |
| Belanja Modal | 2,97 | 40 | 7,41 | Tidak Baik |
| **Jumlah BELANJA DAERAH** | 22,73 | 40 | 56,83 | Tidak Baik |

**Tabel 7** Nilai Kinerja Penyerapan anggaran Triwulan 3 tahun 2019

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BELANJA DAERAH** | Penyerapan Anggaran  % | Target (%) | NKPAn | Kriteria |
| **BELANJA TIDAK LANGSUNG** | 57,39 | 60 | 95,65 | Baik |
| Belanja Pegawai | 61,69 | 60 | 102,81 | Sangat Baik |
| Belanja Hibah | 33,69 | 60 | 56,16 | Tidak Baik |
| Belanja Bantuan Sosial | 25,22 | 60 | 42,03 | Tidak Baik |
| Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa | 0,00 | 60 | 0,00 | Tidak Baik |
| Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa | 54,27 | 60 | 90,44 | Baik |
| Belanja Tidak Terduga | 53,20 | 60 | 88,67 | Cukup Baik |
| **BELANJA LANGSUNG** | 26,01 | 60 | 43,35 | Tidak Baik |
| Belanja Pegawai | 40,10 | 60 | 66,83 | Kurang Baik |
| Belanja Barang Dan Jasa | 38,47 | 60 | 64,12 | Kurang Baik |
| Belanja Modal | 13,02 | 60 | 21,69 | Tidak Baik |
| **Jumlah BELANJA DAERAH** | 43,52 | 60 | 72,54 | Kurang Baik |

**Tabel 7.** Nilai Kinerja Penyerapan anggaran Triwulan 4 tahun 2019

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BELANJA DAERAH** | Penyerapan Anggaran  % | Target (%) | NKPAn | Kriteria |
| **BELANJA TIDAK LANGSUNG** | 57,39 | 60 | 95,65 | Baik |
| Belanja Pegawai | 61,69 | 60 | 102,81 | Sangat Baik |
| Belanja Hibah | 33,69 | 60 | 56,16 | Tidak Baik |
| Belanja Bantuan Sosial | 25,22 | 60 | 42,03 | Tidak Baik |
| Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa | 0,00 | 60 | 0,00 | Tidak Baik |
| Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa | 54,27 | 60 | 90,44 | Baik |
| Belanja Tidak Terduga | 53,20 | 60 | 88,67 | Cukup Baik |
| **BELANJA LANGSUNG** | 26,01 | 60 | 43,35 | Tidak Baik |
| Belanja Pegawai | 40,10 | 60 | 66,83 | Kurang Baik |
| Belanja Barang Dan Jasa | 38,47 | 60 | 64,12 | Kurang Baik |
| Belanja Modal | 13,02 | 60 | 21,69 | Tidak Baik |
| **Jumlah BELANJA DAERAH** | 43,52 | 60 | 72,54 | Kurang Baik |

**Tabel 8.** Nilai Kinerja Penyerapan anggaran Triwulan 4 tahun 2019

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BELANJA DAERAH** | Penyerapan Anggaran  % | Target (%) | NKPAn | Kriteria |
| **BELANJA TIDAK LANGSUNG** | 89,75 | 90 | 99,73 | Baik |
| Belanja Pegawai | 84,95 | 90 | 94,39 | Baik |
| Belanja Hibah | 91,38 | 90 | 101,54 | Sangat Baik |
| Belanja Bantuan Sosial | 87,77 | 90 | 97,52 | Baik |
| Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa | 0,00 | 90 | 0,00 | Tidak Baik |
| Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa | 99,52 | 90 | 110,57 | Sangat Baik |
| Belanja Tidak Terduga | 56,00 | 90 | 62,23 | Kurang Baik |
| **BELANJA LANGSUNG** | 69,43 | 90 | 77,15 | Kurang Baik |
| Belanja Pegawai | 89,98 | 90 | 99,97 | Baik |
| Belanja Barang Dan Jasa | 78,71 | 90 | 87,46 | Cukup Baik |
| Belanja Modal | 58,57 | 90 | 65,08 | Kurang Baik |
| **Jumlah BELANJA DAERAH** | 80,77 | 90 | 89,75 | Cukup Baik |

**Tabel 9.** Nilai Kinerja Penyerapan anggaran Triwulan 1 tahun 2020

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BELANJA DAERAH** | Penyerapan Anggaran  % | Target (%) | NKPAn | Kriteria |
| **BELANJA TIDAK LANGSUNG** | 8,28 | 15 | 55,20 | Tidak Baik |
| Belanja Pegawai | 15,28 | 15 | 101,87 | Sangat Baik |
| Belanja Hibah | 0,08 | 15 | 0,53 | Tidak Baik |
| Belanja Bantuan Sosial | 0 | 15 | 0,00 | Tidak Baik |
| Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa | 0 | 15 | 0,00 | Tidak Baik |
| Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa | 0 | 15 | 0,00 | Tidak Baik |
| Belanja Tidak Terduga | 0,46 | 15 | 3,07 | Tidak Baik |
| **BELANJA LANGSUNG** | 7,33 | 15 | 48,87 | Tidak Baik |
| Belanja Pegawai | 2,98 | 15 | 19,87 | Tidak Baik |
| Belanja Barang Dan Jasa | 6,91 | 15 | 46,07 | Tidak Baik |
| Belanja Modal | 8,28 | 15 | 55,20 | Tidak Baik |
| **Jumlah BELANJA DAERAH** | 15,61 | 15 | 104,07 | Sangat Baik |

**Tabel 10.** Nilai Kinerja Penyerapan anggaran Triwulan 2 tahun 2020

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BELANJA DAERAH** | Penyerapan Anggaran  % | Target (%) | NKPAn | Kriteria |
| **BELANJA TIDAK LANGSUNG** | 27,49 | 40 | 68,73 | Kurang Baik |
| Belanja Pegawai | 39,2 | 40 | 98,00 | Baik |
| Belanja Hibah | 18,45 | 40 | 46,13 | Tidak Baik |
| Belanja Bantuan Sosial | 0,83 | 40 | 2,08 | Tidak Baik |
| Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa | 0 | 40 | 0,00 | Tidak Baik |
| Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa | 11,72 | 40 | 29,30 | Tidak Baik |
| Belanja Tidak Terduga | 16,84 | 40 | 42,10 | Tidak Baik |
| **BELANJA LANGSUNG** | 19,27 | 40 | 48,18 | Tidak Baik |
| Belanja Pegawai | 14,41 | 40 | 36,03 | Tidak Baik |
| Belanja Barang Dan Jasa | 20,33 | 40 | 50,83 | Tidak Baik |
| Belanja Modal | 18,01 | 40 | 45,03 | Tidak Baik |
| **Jumlah BELANJA DAERAH** | 24,44 | 40 | 61,10 | Kurang Baik |

**Tabel 11.** Nilai Kinerja Penyerapan anggaran Triwulan 3 tahun 2020

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Belanja Daerah** | Penyerapan Anggaran  % | Target (%) | Nkpan | Kriteria |
| **Belanja Tidak Langsung** | 50,3 | 60 | 83,83 | Cukup Baik |
| Belanja Pegawai | 63,05 | 60 | 105,08 | Sangat Baik |
| Belanja Hibah | 73,39 | 60 | 122,32 | Sangat Baik |
| Belanja Bantuan Sosial | 23,27 | 60 | 38,78 | Tidak Baik |
| Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa | 0 | 60 | 0,00 | Tidak Baik |
| Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa | 21,48 | 60 | 35,80 | Tidak Baik |
| Belanja Tidak Terduga | 33,44 | 60 | 55,73 | Tidak Baik |
| **Belanja Langsung** | 34,76 | 60 | 57,93 | Tidak Baik |
| Belanja Pegawai | 24,6 | 60 | 41,00 | Tidak Baik |
| Belanja Barang Dan Jasa | 33,77 | 60 | 56,28 | Tidak Baik |
| Belanja Modal | 36,97 | 60 | 61,62 | Kurang Baik |
| **Jumlah Belanja Daerah** | 44,53 | 60 | 74,22 | Kurang Baik |

**Tabel 11.** Nilai Kinerja Penyerapan anggaran Triwulan 4 tahun 2020

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Belanja Daerah** | Penyerapan Anggaran  % | Target (%) | Nkpan | Kriteria |
| **Belanja Tidak Langsung** | **70,98** | **90** | 78,87 | Kurang Baik |
| Belanja Pegawai | 86,52 | **90** | 96,13 | Baik |
| Belanja Hibah | 96,89 | **90** | 107,66 | Sangat Baik |
| Belanja Bantuan Sosial | 95,49 | **90** | 106,10 | Sangat Baik |
| Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa | 86,43 | **90** | 96,03 | Baik |
| Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa | 33,17 | **90** | 36,86 | Tidak Baik |
| Belanja Tidak Terduga | 57,67 | **90** | 64,08 | Kurang Baik |
| **Belanja Langsung** | **67,75** | **90** | 75,28 | Kurang Baik |
| Belanja Pegawai | 39,96 | **90** | 44,40 | Tidak Baik |
| Belanja Barang Dan Jasa | 59,43 | **90** | 66,03 | Kurang Baik |
| Belanja Modal | 82,23 | **90** | 91,37 | Baik |
| **Jumlah Belanja Daerah** | **69,78** | **90** | 77,53 |  |

**Simpulan**

Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan anggaran belanja daerah Kabupaten Sumenep pada tahun 2019 tergolong cukup efektif, namun mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi kurang efektif akibat dampak kebijakan PPKM selama pandemi. Meskipun demikian, tingkat efisiensi pengelolaan anggaran pada kedua tahun tersebut tetap berada dalam kategori sangat efisien, menunjukkan bahwa tidak terjadi pemborosan anggaran. Kinerja penyerapan anggaran di setiap triwulan masih menunjukkan banyak kendala, terutama pada belanja langsung dan bantuan keuangan, yang semakin menurun pada tahun 2020 akibat berbagai hambatan dalam realisasi anggaran selama pandemi.

Pemerintah daerah perlu meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran dengan perencanaan yang lebih realistis dan berbasis kebutuhan prioritas, serta mengoptimalkan penyerapan anggaran melalui percepatan administrasi dan koordinasi antar instansi. Evaluasi dan monitoring berkala harus diperkuat untuk mengidentifikasi kendala dalam realisasi anggaran serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, dalam menghadapi kondisi darurat seperti pandemi, diperlukan skema anggaran yang fleksibel namun tetap efektif agar program dan kegiatan dapat tetap berjalan sesuai target dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

**Daftar Pustaka**

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2020). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020. BPK RI.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep. (2021). Statistik Daerah Kabupaten Sumenep 2021. BPS Sumenep.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020. Kementerian Keuangan RI.

Mardiasmo. (2018). Akuntansi sektor publik (Revisi). Penerbit Andi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Republik Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

World Bank. (2020). The impact of COVID-19 on subnational governments in Indonesia.